

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD GOVERNANCE*,
PERANAN AUDITOR INTERNAL, DAN KEADILAN ORGANISASI
TERHADAP TINGKAT KECURANGAN
(Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)**

**Oleh :
Muqti Randy Syarif
Pembimbing: Kirmizi dan Rofika**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: muqtirandys@gmail.com*

*The Influence of Internal Control, Good Governance, The Role of The Internal
Auditor, and Organization Justice on The Level of Fraud at
Rokan Hulu's Government Agencies*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the effect of the internal control, good governance, the role of the internal auditor, and organization justice on the level of fraud. The population of this study were civil servants whose working in government agencies (29 agencies) in Rokan Hulu regency. This research is using purposive sampling method. Data that used in this research is primary data by delivering the questioners directly to the government agencies in Rokan Hulu. Total respondents which is used in this research are 76 respondents (87.35 %). The analyzing method is Double Regression methods using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 20. The t test, F test, and determination coefficient test was used to test the hypothesis. Result of the study indicates that internal control, good governance, the role of the internal auditor, and organization give negative influence on the level of fraud. All of the independent variables jointly influence dependent variables as much as 70.9%, while 29.1% is influenced by other unclear variable.

Keywords : Control, Governance, Auditor, Justice, and Fraud.

PENDAHULUAN

Kecurangan atau *fraud* sekarang menjadi isu yang sering kita dengar. Setiap hari media massa selalu memberitakan tentang korupsi, yang mana korupsi ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan kecurangan. Kecurangan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau aturan dan dilakukan secara sengaja

dengan maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan dapat merugikan orang lain.

Menurut Tuanakotta (2013:28) kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan anacaman kekerasan atau ancaman. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk

memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Penyebab orang atau kelompok melakukan kecurangan dijelaskan Cressey (1953) dalam hipotesisnya yang dikenal dengan istilah *The Fraud Triangle*. *The Fraud Triangle* ini menjelaskan 3 penyebab orang atau kelompok melakukan kecurangan yaitu karena adanya pendorong atau paksaan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor ini mungkin saja bukanlah penyebab utama seseorang atau kelompok melakukan kecurangan. Namun sifat dan perilaku manusia itu sendirilah penyebab utamanya. Sifat serakah dan perilaku tidak pernah puas menyebabkan orang atau kelompok melakukan tindakan kecurangan.

Untuk dapat memecahkan permasalahan kecurangan di suatu instansi perlu dirancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Semakin efektif sistem pengendalian internal suatu instansi pemerintah, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP adalah proses integral pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan UU yang diselenggarakan secara menyeluruh

di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Selain faktor pengendalian internal penerapan *good governance* atau tata kelola yang baik juga mempengaruhi tingkat kecurangan. *Good governance* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam menciptakan sebuah struktur dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada pada masing-masing instansi pemerintahan, sehingga memiliki sistem yang dapat mengatur Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut (Amalia, 2013).

Selanjutnya peranan auditor internal dalam sektor publik mempengaruhi kecurangan yang terjadi dalam praktik sektor publik. Dalam hal ini peran auditor internal di emban oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah pegawai negeri sipil yang dapat mendapat tugas melakukan pengawasan secara terstruktur dan sistematis terhadap seluruh perangkat pelaksana pemerintahan dimana APIP itu berada. APIP disini biasanya dikenal sebagai Inspektorat.

Menekan tingkat kecurangan dapat juga dilakukan dengan menciptakan keadilan organisasi dalam pemerintahan itu sendiri. Bila keadilan pada pegawai terpenuhi dengan baik maka produktivitas dan hasil kerja pegawai akan meningkat dan menghilangkan motivasi untuk melakukan tindakan yang merugikan. Dalam penelitian Herman (2013) bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Keadilan akan menghilangkan

tindakan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Seperti telah dipaparkan di atas, peluang terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cukup besar. Di pemerintah daerah kecurangan tersebut dapat terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagai kabupaten yang tergolong baru dimekarkan, Kabupaten Rokan Hulu memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat apabila dibandingkan dengan kabupaten lain yang telah terlebih dahulu berdiri. Namun kenyataannya tindakan kecurangan sering terjadi di pemerintah daerah ini. Yang sering menjadi sorotan adalah khususnya kasus korupsi dan penyalahgunaan APBD.

Pada tahun 2007, mantan Bupati Rokan Hulu, Ramlan Zas ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi anggaran pos pengeluaran tak tersangka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2003 dengan kerugian negara Rp3,057 miliar (Muhardi, 2012).

Kasus kecurangan lainnya terjadi pada tahun 2013, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu, bernama Heppy Noviard menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah KPUD di Kabupaten Rokan Hulu (Sani, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Governance*, Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi

Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)”.
Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan?, 2) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap tingkat kecurangan?, 3) Apakah peranan auditor internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan?, 4) Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap tingkat kecurangan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat kecurangan, 2) untuk mengetahui apakah ada hubungan *good governance* terhadap tingkat kecurangan, 3) untuk mengetahui apakah ada hubungan peranan auditor internal terhadap tingkat kecurangan, 4) untuk mengetahui apakah ada hubungan keadilan organisasi terhadap tingkat kecurangan.

TELAAH PUSTAKA

Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan anacaman kekerasan atau ancaman. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Tuanakotta 2013:28).

Cressey (1953) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum disebabkan oleh 3 hal. Hipotesis yang disampaikan ini

dikenal dengan segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*). *Fraud Triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu pendorong (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*).

Dalam Tuanakotta (2010:101) menyebutkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut: 1) Korupsi : Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang telah merajalela di seluruh wilayah. Di sektor pemerintahan sendiri korupsi telah terjadi di mana-mana dan telah melekat hampir di seluruh sendi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. 2) Penyalahgunaan aset: Penyalahgunaan aset/harta di instansi pemerintah adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset negara atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset negara tersebut untuk kepentingan pribadi. 3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan: Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Guna mencegah kecurangan tersebut dapat terjadi maka dibuatlah suatu pengendalian internal. Di sektor pemerintahan, sistem ini

dikenal dengan istilah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapannya, SPIP ini memiliki beberapa unsur yaitu: lingkungan pengendalian, pengendalian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dimana kelima unsur ini harus berjalan dengan baik sehingga sistem pengendalian internal tersebut dapat dikatakan efektif.

Selain dengan adanya pengendalian internal, penerapan *good governance* dapat pula menekan tingkat kecurangan. *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara, 2000). *Good governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manjerial untuk mengelola sumber daya dan urusan negara dengan cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008).

Tingkat kecurangan juga ditekankan dengan memaksimalkan peran auditor internal. Menurut Elder *et al.* (2011), auditor internal merupakan posisi unik yang melakukan audit operasional dimana istilah audit internal dan audit operasional secara bergantian digunakan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak semua audit operasional dilakukan oleh auditor internal atau hanya auditor internal yang melakukan audit operasional. Menurut Andayani (2008:7), audit internal adalah suatu fungsi untuk menilai independen yang ada di dalam suatu instansi pemerintah serta memiliki aktivitas yang memberikan jaminan atas keyakinan dan konsultasi.

Jadi, dapat disimpulkan auditor internal adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengawas pada setiap instansi pemerintah yang bersifat independen untuk menjalankan dan melakukan tugasnya sebagai pemeriksa terhadap pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dalam hal ini yang berperan sebagai auditor pemerintah daerah adalah Inspektorat yang merupakan salah satu bagian dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bertujuan mengawasi pemerintah daerah tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kecurangan adalah keadilan organisasi. Keadilan organisasi (*organizational justice*) adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian

mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan (Mariani, 2011). Aspek yang diukur dalam keadilan organisasi ini ada 3 yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.

Pengendalian Internal dan Tingkat Kecurangan

Pengendalian internal adalah sebuah sistem yang sengaja dibuat dan diterapkan guna pencapaian tujuan suatu organisasi/instansi. Dalam penerapannya, pengendalian internal harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi/instansi. Hal ini agar pengendalian internal tersebut berjalan dengan efektif dan efisien sehingga pencapaian tujuan dari organisasi/instansi dapat cepat terlaksana.

Dalam hal hubungannya dengan kecurangan, pengendalian internal dapat mengurangi tingkat kecurangan. Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Hipotesis yang disampaikan Cressey (1953) yang dikenal dengan istilah *Fraud Triangel* menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecurangan adalah karena adanya peluang. Dimana peluang disini muncul salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.

H_1 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan

Good Governance dan Tingkat Kecurangan

Good governance diartikan sebagai suatu konsep pemerintahan yang menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan

transparansi dalam struktur pemerintahannya agar dapat menjaga sinergis yang konstruktif untuk terciptanya efisien dan efektifitas pada pemerintahan tersebut. Dan pada akhirnya pemerintah tersebut bisa dikatakan pemerintah yang baik dan bersih.

Prinsip-prinsip dalam *good governance* ini memiliki perannya masing-masing di dalam pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip partisipasi merupakan suatu bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan keikutsertaan tersebut secara tidak langsung terciptanya sistem pengawasan oleh masyarakat terhadap segala kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sehingga sistem pengawasan tersebut akan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bahkan dapat menghilangkan tindakan kecurangan di pemerintah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Gozali (2012) yang menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap perilaku *fraud*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013), bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan mengurangi kasus kecurangan di dalam instansi-instansi itu sendiri.

H₂ : *Good governance* berpengaruh terhadap tingkat kecurangan.

Peranan Auditor Internal dan Tingkat Kecurangan

Peran auditor internal di pemerintah daerah diemban oleh Inspektorat Daerah. Apabila Inspektorat Daerah telah melakukan perannya sebagai auditor internal

dengan baik maka akan berdampak berkurangnya tingkat kecurangan. Hal ini karena tidak adanya peluang pegawai untuk dapat melakukan kecurangan. Tidak adanya peluang tersebut karena Inspektorat Daerah terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD, apakah sudah sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Wardhini (2010) dalam penelitiannya menyebutkan peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan auditor internal akan berpengaruh dengan tingkat kecurangan. Penelitian yang dilakukan Wiliyanti (2013) juga menunjukkan auditor internal yang berperan secara efektif di suatu organisasi akan mengurangi terjadinya kecurangan.

H₃ : Peranan auditor internal berpengaruh terhadap tingkat kecurangan

Keadilan Organisasi dan Tingkat Kecurangan

Keadilan organisasi adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Keadilan terdiri dari tiga macam yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional (Mariani, 2011).

Penelitian Christofel (2010) yang meneliti tentang moderasi pengendalian internal pada hubungan pengaruh keadilan organisasi terhadap tingkat kecurangan (*fraud*), menyimpulkan bahwa interaksi

keadilan organisasi dengan Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh yang berarti terhadap *fraud* (tingkat kecurangan) karyawan. Hal ini berarti semakin tingginya Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal dapat mengakibatkan rendahnya *fraud* (tingkat kecurangan) karyawan.

H₄ : Keadilan organisasi berpengaruh terhadap tingkat kecurangan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di instansi yang berada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 29 unit.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: Sekretaris, Kepala bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden.

Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan pertanyaan tertulis (kuesioner). Data primer dikumpulkan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda melalui bantuan SPSS 20. Hipotesis 1, 2, 3, 4 akan diuji menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kecurangan

a = Konstanta

$\beta_{(1,2,3,4)}$ = Koefisien regresi masing-masing X

X₁ = Pengendalian Internal

X₂ = *Good Governance*

X₃ = Peranan Auditor Internal

X₄ = Keadilan Organisasi

e = *error*

Definisi Variabel

a. Tingkat Kecurangan

Kecurangan adalah adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan anacam kekerasan atau ancaman. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi (Tuanakotta, 2013:28). kecurangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada oleh orang ataupun kelompok, dimana pelaku kecurangan ini melakukan dengan sengaja dan bermaksud mencari keuntungan pribadi dan akibat perbuatannya dapat merugikan pihak lain.

b. Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional organisasi atau pemerintah agar tujuan dari organisasi atau pemerintah tersebut dapat tercapai.

c. Good Governance

Good governance dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan negara dengan cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). *Good governance* merupakan suatu konsep pemerintahan yang menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam struktur pemerintahannya agar dapat menjaga sinergis yang konstruktif untuk terciptanya efisien dan efektifitas pada pemerintahan tersebut.

d. Peranan Auditor Internal

Auditor internal adalah suatu fungsi untuk menilai independen yang ada di dalam suatu instansi pemerintah serta memiliki aktivitas

yang memberikan jaminan atas keyakinan dan konsultasi Andayani (2008:3). Auditor internal adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengawas pada setiap instansi pemerintah yang bersifat independen untuk menjalankan dan melakukan tugasnya sebagai pemeriksa terhadap pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dalam hal ini yang berperan sebagai auditor pemerintah daerah adalah Inspektorat yang merupakan salah satu bagian dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bertujuan mengawasi pemerintah daerah tersebut.

e. Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan (Mariani, 2011). Keadilan organisasi merupakan suatu kondisi dimana di dalam organisasi telah tercipta keadilan dan kesamarataan dalam semua aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa kuesioner, maka data kuesioner dari responden yang dapat diolah sebanyak 76 buah.

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji normalitas dan uji

asumsi klasik, yaitu autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 76, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,229. Hasil pengujian validitas data pada seluruh item pernyataan-pernyataan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuosioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Untuk pengujian reliabilitas penulis akan melihat nilai dari *Cronbach alpha*. Jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 maka data yang digunakan dalam penelitian ini *reliable*, sebaliknya jika nilai *Cronbach alpha* lebih rendah dari 0,60 maka nilai yang digunakan dalam penelitian ini tidak *reliable*. Dengan bantuan program SPSS maka dapat disimpulkan bahwa hasil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena nilai *Cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan diatas 0,60.

Analisis Deskriptif

Hasil pengolahan SPSS mengenai deskriptif variabel sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat Kecurangan Pengendalian Internal	25.7632	5.50846	76
Good Governance	56.5263	8.48131	76
Peranan Auditor Internal	47.4211	8.26440	76
Keadilan Organisasi	39.3289	5.08695	76
	44.8553	6.61655	76

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa nilai rata-rata (mean) yang dimiliki variabel tingkat kecurangan tergolong rendah, yakni 25,763. Rata-rata responden menjawab pertanyaan kuisioner dengan jawaban tidak setuju yang berarti bahwa tingkat kecurangan di SKPD Kabupaten Rokan Hulu tergolong rendah. Sedangkan untuk keempat variabel independen, rata-rata jawaban responden adalah bahwa pengendalian internal, good governance, peranan auditor internal, dan keadilan organisasi secara baik.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	65.563	3.023	
PI	-.121	.048	-.186
1 GG	-.191	.055	-.286
PAI	-.433	.090	-.400
KI	-.155	.070	-.186

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi linear berganda yang diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 65.563 - 0.121 X_1 - 0.191X_2 - 0.433 X_3 - 0.155 X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 65.563. Artinya bahwa tanpa adanya pengendalian internal, good governance, peranan auditor internal, dan keadilan organisasi maka tingkat kecurangan akan naik sebesar 65.563.

Hasil Uji t

Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai t_{tabel} dengan $df = 71$, pada tingkat signifikan 0.05 adalah sebesar 1.994.

Tabel 3
Hasil Uji t

	t	Sig	A
X1	-2.529	.014	0.05
X2	-3.464	.001	0.05
X3	-4.805	.000	0.05
X4	-2.214	.030	0.05

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , artinya setiap variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji F

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima. F_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2.501. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 46.631 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1648.308	4	412.077	46.631	.000 ^b
Residual	627.429	71	8.837		
Total	2275.737	75			

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian R^2 digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.709	1.998

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square sebesar 0,709, artinya sebesar 70.9% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 70.9% tingkat kecurangan dipengaruhi oleh variabel pengendalian internal, good governance, peranan auditor internal dan keadilan organisasi. Sedangkan sisanya sebesar 29.1% dipengaruhi

oleh variable-variabel lain selain variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis Satu (H₁)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara pengendalian internal dan tingkat kecurangan di SKPD Kabupaten Rokan Hulu, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal terhadap tingkat kecurangan. sehingga H₁ diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik dan efektif pengendalian internal yang dilaksanakan, maka tingkat kecurangan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini didukung oleh Artini *et al* (2014) yang menyatakan pengendalian internal memegang peranan penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang. Rahmawati (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan dapat terhindarnya dari kecenderungan kecurangan.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara *good governance* dan tingkat kecurangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *good governance* terhadap tingkat kecurangan. sehingga H₂ diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *good governance*, maka

semakin rendah tingkat kecurangan.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013), bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan cermat, maka akan mengurangi kasus kecurangan di dalam instansi-instansi itu sendiri. Semakin baik implementasi *good governance* maka semakin rendah *fraud* atau tindakan kecurangan pada SKPD di Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara peranan auditor internal dan tingkat kecurangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peranan auditor internal dengan tingkat kecurangan sehingga H₃ diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi peranan auditor internal, maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Wiliyanti (2013) yang menyatakan auditor internal yang berperan secara efektif di suatu organisasi akan mengurangi terjadinya kecurangan.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H₄)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara keadilan organisasi dan tingkat kecurangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keadilan organisasi dengan tingkat kecurangan, sehingga H₄ diterima. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan organisasi akan menekan terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Herman (2013) yang menyatakan bahwa ketika seseorang mendapat perlakuan yang adil maka akan menghilangkan rasa kecemburuan antar pegawai dan mereka tidak akan melakukan perlawanan protes dan mereka tidak akan terdorong untuk melakukan tindakan yang merugikan instansi seperti berdusta ataupun melakukan bentuk-bentuk kecurangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Governance*, Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Artinya adalah bahwa semakin diterapkannya pengendalian internal dengan baik di SKPD maka tindakan kecurangan akan dapat berkurang.
2. *Good governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Ini artinya apabila suatu pemerintahan telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* maka dapat dikatakan tindakan kecurangan akan berkurang.
3. Peranan auditor internal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Yang artinya semakin baik peran yang dilakukan inspektorat

sebagai auditor internal pemerintah daerah maka tindakan kecurangan dapat ditekan.

4. Keadilan organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan. Yang mana maksudnya adalah apabila telah tercipta keadilan di suatu organisasi, maka dapat dikatakan tindakan kecurangan akan semakin berkurang.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain: 1) Penelitian ini hanya mencakup wilayah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mencakup wilayah yang lebih luas atau wilayah yang lainnya sebagai objek penelitian. 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi tingkat kecurangan. 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuesioner. Sehingga tingkat pengembalian kuesioner lebih tinggi dan dapat menggambarkan hasil yang lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Tri. 2013. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Peranan Auditor Internal, dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten*

- Kampar*). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Andayani, Wuryan. 2008. *Audit Internal*. Edisi I. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta
- Artini et al.2014. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana*. Jurnal Akuntansi Program S1, Volume 2 No.1
- Cressey, D.R. 1953. *Others People's Money: A Study In The Social Psychology of Embezzlement*, The Free Press, Glencoe, IL.
- Christofel S, Rendy. 2010. *Moderasi Pengendalian Internal Pada Hubungan Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap Tingkat Kecurangan (Fraud) Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Elder, Randal J.,et al. 2011. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jilid I. Salemba Empat. Jakarta
- Gozali, Go Rizal, 2012. *Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Fraud pada Lembaga Perbankan Nasional : Studi Empiris pada PT. Bank Mandoro (Persero) Tbk*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Herman, Lisa A. 2013. *Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- Mariani. 2011. *Anteseden dan Moderasi Kualitas Pengendalian Internal terhadap Hubungan antara Keadilan Organisasi dan Kinerja Karyawan: Studi pada Pemerintah Kabupaten Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Muhardi, Fazar. 2012. *Ramlan Zas Akhirnya Ditangkap*. Diunduh dari: (<http://antarariau.com/berita/19804/ramlan-zas-akhirnya-ditangkap>). Diakses 18 Mei 2015.
- Rahmawati, Ardiani Peni dan Idjang Soetikno. 2012. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Intenal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sani, Abdullah. 2013. *PNS di Rokan Hulu Korupsi Dana Hibah*. Diunduh dari: (<http://www.merdeka.com/peri-stiwa/pns-di-rokan-hulu-korupsi-dana-hibah.html>). Diakses 18 Mei 2015
- Widyananda, Herman. 2008. *Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakkan Good Governance di Indonesia*. BPK-RI. Jakarta
- Wiliyanti, Rizke., Ria Nelly Sari dan Edfan Darlis. 2013. *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)*. Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA*. Salemba Empat. Jakarta
- Zuraidah et al, 2012. *The Effect of Internal Control Procedures and Good Governance on Fraud Incidents in Government Agencies*. Research Forum (IACSF). Jakarta.